

Bulan :

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
---	---	---	---	---	---	---	---	---	----	----	----

2	0	2	3
---	---	---	---



SUBBAGIAN HUMAS

Tanggal :

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	

Media Online	
Media Cetak	Koran Jakarta

# Guru Honorer agar Dibayar Sesuai dengan UMP

**Pemprov DKI mesti terbuka dengan permasalahan teknis dan sistem peng-gajian para PjLP serta guru honorer demi menghindari kecurigaan.**

JAKARTA - Pemprov DKI Jakarta diminta membayar upah untuk petugas Penyedia Jasa Layanan Perorangan (PJLP) dan guru honorer sesuai dengan besaran upah minimum provinsi (UMP) 2023. Desakan ini datang dari anggota Komisi D DPRD DKI Jakarta, Hardiyanto Kenneth, Kamis (8/6).

Kennet mengaku banyak menerima keluhan terkait upah terhadap petugas PJLP, di antaranya dari UPK Badan Air Dinas Lingkungan Hidup, Sumber Daya Air, Bina

Marga DKI Jakarta, dan guru honorer. "Saya ingin bertanya kepada Pemerintah Provinsi DKI Jakarta dan PJ Gubernur Heru Budi Hartono, mengapa upah petugas PJLP hingga guru honorer di bawah UMP 2023?" tanyanya.

Menurut Kenneth, seharusnya PJLP dan guru honorer di lingkungan Provinsi DKI Jakarta mendapat upah sebesar 4.901.798 seperti Keputusan Gubernur Nomor 1153 Tahun 2022 tentang UMP DKI 2023. Namun kenyataannya, saat ini PJLP dan para guru honor hanya menerima pembayaran sekitar 4,6 juta.

Jelas, ada kekurangan nilai upah sebesar 300 ribu. "Ini sangat memberatkan," tutur Kenneth. Padahal, para PJLP dan guru honorer memiliki kontribusi sangat besar dalam membantu program pembangunan Jakarta. "Pemprov dan Gubernur harus memahami ini masalah serius dan sangat sensitif. Mereka sudah bekerja keras,

tetapi tidak dibayar sesuai dengan aturan," jelasnya.

Kenneth juga minta Pemprov DKI terbuka dengan permasalahan teknis dan sistem penggajian para PJLP serta

« Pemprov dan Gubernur harus memahami ini masalah serius dan sangat sensitif. Mereka sudah bekerja keras, tetapi tidak dibayar sesuai dengan aturan. »

**HARDIYANTO KENNETH**  
Anggota Komisi D DPRD DKI Jakarta

guru honorer demi menghindari kecurigaan. Tidak menutup kemungkinan bagi Kenneth untuk memanggil beberapa pihak Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) untuk membahas masalah peng-

upahan. "Masalah ini harus selesai sampai mereka mendapat haknya, upah sesuai dengan UMP 2023," harapnya.

## HUT DKI

Masalah lain DKI yang tengah disorot terkait soal pariwisata. Pemerintah Kota Jakarta Barat mengimbau para pelaku atau penanggung jawab usaha sektor pariwisata tidak mempolitisasi publikasi terkait HUT ke-496 DKI Jakarta.

"Para pelaku atau penanggung jawab wisata seperti hotel, restoran, tempat karaoke atau tempat hiburan lain diimbau tidak mempolitisasi publikasi HUT 496 DKI Jakarta baik secara offline maupun secara online," kata Kepala Sudin Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Jakarta Barat, Dedi Sumardi.

Simbol atau pesan-pesan berbau kampanye partai politik tertentu tidak diperkenankan diselipkan dalam publikasi HUT ke-496 DKI Jakarta. Hal

ini disampaikan terkait imbauan sebelumnya agar para pelaku wisata bersama-bersama menyemarakkan HUT Jakarta. Caranya seperti memasang umbul-umbul, dekorasi, bagasi mobil, dan bentuk publikasi fisik lainnya. Ini dengan merujuk logo dan desain turunan HUT DKI ke 496 Jakarta.

Selain itu, logo dan desain HUT tersebut juga diharapkan dapat dipublikasikan secara daring melalui situs web, media sosial dan platform daring lainnya. Imbauan tersebut mesti diterapkan mengingat publikasi terkait HUT Jakarta bukanlah kampanye politik. Maka, publikasi tersebut menolok segala bentuk politisasi.

Publikasi untuk menyemarakkan HUT Jakarta diimbau dilakukan secara serentak mulai dari 21 Mei hingga 30 Juni. "Intinya, semua bentuk publikasi terkait HUT ke-496 DKI Jakarta menolak segala bentuk politisasi atau kampanye partai politik," ujarnya. ■ **Ant/G-1**